

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN RATA - RATA LAMA SEKOLAH DI SULAWESI TENGAH

Fitri S Kasim<sup>1\*</sup>, Huzaemah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Alkhairaat

fitris.kasim@gmail.com<sup>1\*</sup>, emahuzaemah69@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

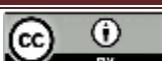
Penelitian ini bertujuan mengukur bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan dan keterwakilan politik membentuk pencapaian pendidikan, yang diproksikan dengan rata-rata lama sekolah perempuan (RLS) pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014-2024. Dengan menggunakan data panel, model terbaik dipilih melalui uji chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman, kemudian diestimasi menggunakan Random Effect. Variable independen meliputi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kontribusi Pendapatan Perempuan (KPP), Proporsi Perempuan Profesional (PPP), serta Proporsi Perempuan di Parlemen (PPPar). Hasil estimasi menunjukkan bahwa IDG, KPP, dan PPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan RLS, menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan partisipasi profesional dalam memperluas kesempatan pendidikan perempuan. Sebaliknya PPPPar berpengaruh positif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa representasi politik perempuan masih bersifat deskriptif dan belum terkonversi menjadi kebijakan substantif yang berfokus pada pendidikan. Temuan ini sejalan dengan teori modal manusia, pemberdayaan, peran ganda, dan peran sosial, serta memperlihatkan adanya kemajuan yang lambat dan tidak merata antarwilayah (misalnya, RLS perempuan di Palu mencapai 11,39 tahun, sementara di Donggala hanya 7,86 tahun). Studi ini menyumbangkan bukti baru di level sub-provinsi dengan memadukan faktor ekonomi dan politik dalam menganalisis determinan pendidikan perempuan, sesuatu yang kerap luput dalam kajian lintas negara. Implikasi kebijakan menekankan perlunya perluasan akses perempuan ke pekerjaan formal, penguatan kapasitas profesional dan kewirausahaan, serta pergeseran dari representasi politik deskriptif menuju representasi substantif, melalui advokasi kebijakan pendidikan yang terarah dan penganggaran responsif gender. Strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian SDGs 4 (pendidikan berkualitas) dan SDGs 5 (kesetaraan gender).

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Gender, Keterwakilan Politik, Kontribusi Ekonomi Perempuan, Perempuan Profesional, Pencapaian Pendidikan, Sulawesi Tengah

### ABSTRACT

*This study aims to quantify how women's economic empowerment and political representation shape educational attainment—measured by women's average years of schooling (AYS)—across districts/municipalities in Central Sulawesi during 2014–2024. Using balanced panel data, we estimate a Random Effects Model (GLS) after model selection via Chow, Lagrange Multiplier, and Hausman tests. Explanatory variables include the Gender Empowerment Index (GEI), Women's Income Contribution (WIC), the Proportion of Professional Women (PPW), and the Proportion of Women in Parliament (PWP). Results indicate that GEI, WIC, and PPW are positively and significantly associated with higher AYS, underscoring the central role of economic empowerment and women's professional participation in advancing educational equality. By contrast, PWP has a positive but statistically insignificant coefficient, suggesting that female political representation remains largely descriptive and has not translated into substantive, education-focused policy effects. The findings align with human capital, empowerment, dual-role, and social role theories and point to slow and uneven progress in gendered educational outcomes across space and time (e.g., Palu at 11.39 years versus Donggala at 7.86). The study contributes sub-provincial, decade-long evidence by jointly modeling economic and political drivers of women's education, offering context often obscured in cross-country analyses. Policy implications prioritize expanding women's access to formal employment, strengthening professional and entrepreneurial capacity, and shifting from descriptive to substantive representation (e.g., targeted education advocacy and gender budgeting) to accelerate progress toward SDG 4 and SDG 5.*

**Keywords:** Gender Empowerment, Political Representation, Women's Income Contribution, Professional Women, Educational Attainment, Sulawesi Tengah



## PENDAHULUAN

Pendidikan perempuan merupakan pilar penting pembangunan global sebagaimana tercermin dalam SDG 4 dan SDG 5. Meski banyak negara menunjukkan kemajuan, laporan *Global Education Monitoring (GEM) Report* (2025) memperlihatkan bahwa kesenjangan gender tetap muncul secara kontekstual, terutama di wilayah dengan hambatan social, ekonomi, dan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan perempuan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh struktur social dan peluang ekonomi yang melingkupinya.

Di Indonesia, pola tersebut turut tercermin dalam Data Badan Pusat Statistik (2024) yang menunjukkan bahwa RLS perempuan (8,54 tahun) masih tertinggal dari laki-laki (9,17 tahun). Sulawesi Tengah mencatat kesenjangan yang lebih kecil, namun tetap menunjukkan ketertinggalan perempuan dalam capaian pendidikan. Perbedaan lebih mencolok tampak pada tingkat kabupaten/kota. Tahun 2024, RLS perempuan di Kota Palu mencapai 11,39 tahun, sementara Donggala hanya 7,86 tahun dan Parigi Moutong 7,96 tahun. Kesenjangan hampir empat tahun ini menggambarkan bahwa peluang pendidikan perempuan dipengaruhi kuat oleh lokasi dan kapasitas layanan publik.

Kesenjangan ini bukan hanya perbedaan angka, tetapi perbedaan peluang hidup. Perempuan di Palu lebih dekat pada peluang melanjutkan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, sementara perempuan di Donggala dan Parigi Moutong menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses sekolah menengah, dan prioritas kebijakan daerah. Hal ini menegaskan bahwa disparitas pendidikan di Sulawesi Tengah bersifat struktural, bukan semata persoalan ekonomi rumah tangga.

Literatur internasional menunjukkan bahwa pendidikan dan pemberdayaan perempuan bersifat kompleks dan kontekstual. Pendidikan dapat memperkuat agency dan peluang ekonomi, namun pemberdayaan ekonomi atau politik juga dapat memperluas akses pendidikan. Temuan studi (Brollo & Troiano, 2016; Clots-Figueras, 2012; Duflo, 2012) menegaskan pentingnya konteks social dan politik dalam mempengaruhi capaian pendidikan perempuan.

Di Indonesia, penelitian mengenai pendidikan perempuan masih banyak berfokus pada analisis nasional atau provinsi, sehingga dinamika internal antarwilayah kerap terabaikan.

Selain itu, sebagian besar penelitian menempatkan pendidikan sebagai penentu pemberdayaan, bukan menilai bagaimana pemberdayaan ekonomi dan politik memengaruhi capaian pendidikan. Cela inilah yang membutuhkan kajian baru yang lebih kontekstual di tingkat kabupaten/kota.

Pada titik inilah penelitian ini menawarkan kontribusi baru. Studi ini memberikan bukti empiris pada level kabupaten/kota, unit analisis yang jarang digunakan dalam riset hubungan pemberdayaan dan pendidikan perempuan di Indonesia. Penelitian ini juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan ekonomi yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kontribusi Pendapatan Perempuan (KPP), Proporsi Perempuan Profesional (PPP), dan Proporsi Perempuan di Parlemen (PPPar) dalam satu model panel 2014 - 2024, pendekatan yang belum banyak dijumpai dalam penelitian sejenis. Kombinasi skala analisis, variabel, dan pendekatan teoritis ini menjadi dasar utama klaim kebaruan penelitian.

Secara teoritis, hubungan pemberdayaan dan pendidikan perempuan dapat dijelaskan melalui modal manusia (Becker, 1964), Capability Approach (Sen, 1999), dan teori pemberdayaan (Kabeer, 1999). Kemandirian ekonomi meningkatkan kemampuan perempuan mengambil keputusan investasi pendidikan, sementara partisipasi dalam sektor profesional dan politik mempengaruhi norma social serta prioritas kebijakan. Kerangka teoritis ini menjadi dasar bagi pemilihan variabel dan model empiris dalam penelitian ini.

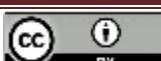
Penelitian ini bertujuan menganalisis:

1. Pengaruh IDG, KPP, dan PPP terhadap RLS perempuan; dan
2. Kontribusi representasi politik perempuan (PPPar) terhadap capaian pendidikan perempuan.

Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi kebijakan pendidikan dan pembangunan responsif gender di Sulawesi Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori Modal Manusia (Becker, 1964) menempatkan pendidikan sebagai investasi yang meningkatkan produktivitas dan peluang pendapatan. Dalam konteks gender, pendidikan perempuan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan memperluas ruang partisipasi sosial. Kerangka ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memperkuat kapasitas ekonomi perempuan seperti pemberdayaan, akses pendapatan, dan



partisipasi profesional berpotensi meningkatkan investasi pendidikan dalam keluarga maupun dirinya sendiri.

Teori pemberdayaan (Kabeer, 1999) melengkapi pandangan tersebut dengan menekankan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial meningkatkan *agency*, yaitu kemampuan perempuan menentukan keputusan penting termasuk pendidikan. Dengan demikian, teori-teori ini membangun fondasi kausal bahwa pemberdayaan ekonomi dan sosial harusnya berkontribusi pada peningkatan RLS perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merefleksikan kapasitas perempuan dalam akses sumber daya ekonomi dan partisipasi publik. Dalam perspektif teori pemberdayaan, meningkatnya akses perempuan terhadap sumber daya memperkuat posisi tawar dalam pengambilan keputusan sehingga berpotensi meningkatkan aspirasi pendidikan. Secara teoretis, IDG yang lebih tinggi menunjukkan lingkungan sosial yang lebih suportif terhadap pendidikan perempuan. Dengan landasan tersebut, IDG diprediksi memiliki hubungan positif dengan RLS.

Kontribusi Pendapatan Perempuan (KPP) dapat dijelaskan melalui household bargaining model, yang menyatakan bahwa anggota rumah tangga dengan kontrol ekonomi lebih besar memiliki pengaruh lebih kuat dalam keputusan domestik. Ketika perempuan memiliki kontribusi pendapatan yang signifikan, posisi tawarnya meningkat, sehingga keputusan terkait investasi pendidikan lebih besar kemungkinan menguntungkan pendidikan perempuan. Dalam kerangka teori ini, KPP menjadi mekanisme yang memperkuat akses perempuan pada pendidikan dan meningkatkan RLS.

Proporsi Perempuan Profesional (PPP) dapat dipahami melalui Social Role Theory (Eagly, 2013), yang menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi profesional mengubah norma sosial dan membentuk ekspektasi baru terhadap peran perempuan. Perempuan yang tampil di sektor profesional berfungsi sebagai role model yang mendorong aspirasi pendidikan dan meningkatkan persepsi masyarakat tentang nilai pendidikan perempuan. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bagaimana peningkatan PPP dapat mendorong peningkatan RLS perempuan.

Representasi politik perempuan (PPPar) dapat dijelaskan dengan teori representasi Pitkin (1967), yang membedakan antara representasi deskriptif dan substantif. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif diharapkan memperkuat

advokasi kebijakan pendidikan yang responsif gender, termasuk alokasi anggaran pendidikan, program pemberdayaan, dan akses layanan pendidikan. Dalam kerangka teoritik ini, meningkatnya proporsi perempuan di parlemen berpotensi meningkatkan RLS perempuan jika representasi tersebut mampu berfungsi secara substantif.

Berdasarkan kerangka teori Modal Manusia, teori pemberdayaan, teori peran sosial, dan teori representasi, penelitian ini merumuskan empat hipotesis utama. Pertama, pemberdayaan gender (IDG) diperkirakan meningkatkan RLS melalui penguatan agency perempuan. Kedua, kontribusi pendapatan perempuan (KPP) diprediksi meningkatkan RLS melalui peningkatan bargaining power dalam rumah tangga. Ketiga, proporsi perempuan profesional (PPP) diperkirakan meningkatkan RLS melalui mekanisme role model sosial. Keempat, proporsi perempuan di parlemen (PPPar) diperkirakan berpengaruh positif terhadap RLS apabila representasi berlangsung secara substantif.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh temuan yang objektif dan terukur dengan desain panel data analysis yang memadukan variasi lintas wilayah (*cross-section*) dan variasi waktu (*time-series*) untuk mengeksplorasi hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif. Unit analisis adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang konsisten serta relevansi konteks pembangunan daerah pasca-reformasi kebijakan desentralisasi fiskal dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika perubahan antarwilayah dari waktu ke waktu, sekaligus mengontrol faktor-faktor tetap yang mungkin memengaruhi hubungan antarvariabel.

## Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data bersumber dari data sekunder yang diterbitkan lembaga resmi pemerintah. Variabel dependen berupa rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen meliputi: (1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), (2) Kontribusi Pendapatan Perempuan (KPP), dan (3) Proporsi Perempuan Profesional (PPP), yang dihimpun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional



(Sakernas). Sedangkan variabel Proporsi Perempuan di Parlemen (PPPar) diperoleh dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dokumentasi DPRD kabupaten/kota.

### Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan model regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 13. Penentuan model terbaik dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi: Chow Test (CEM vs FEM), Lagrange Multiplier Test (CEM vs REM), dan Hausman Test (FEM vs REM). Model terpilih kemudian diestimasi dengan Random Effect Model (REM) menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS). Secara umum, bentuk persamaan regresi panel dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 IDG_{it} + \beta_2 KPP_{it} + \beta_3 PPP_{it} + \beta_4 PPPar_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$  : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan pada wilayah  $i$  dan tahun  $t$   
 $IDG_{it}$  : Indeks Pemberdayaan Gender  
 $KPP_{it}$  : Kontribusi Pendapatan Perempuan  
 $PPP_{it}$  : Proporsi Perempuan Profesional  
 $PPPar_i$  : Proporsi Perempuan di Parlemen  
 $e_{it}$  : error term

Uji asumsi klasik (normalitas residual dan multikolinieritas) dilakukan untuk memastikan

validitas hasil estimasi. Selanjutnya, uji-t digunakan untuk menilai pengaruh parsial variabel independen, uji-F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur daya jelaskan model terhadap variasi RLS perempuan.

## HASIL PENELITIAN

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tiga langkah utama dalam menentukan metode estimasi yang tepat pada analisis data panel. Pertama, uji Chow digunakan untuk membedakan antara pendekatan *common effect* dan *fixed effect*, dengan tujuan menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antarunit (wilayah) yang perlu diperhitungkan dalam model. Kedua, uji Hausman diterapkan untuk membandingkan prosedur *fixed effect* dan *random effect*, sehingga dapat menilai apakah efek acak berkorelasi dengan variabel independen, yang menentukan model mana yang lebih konsisten. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memeriksa apakah model dengan efek acak lebih sesuai dibandingkan *pooled OLS* (efek umum), dengan mempertimbangkan variasi acak antarunit. Kombinasi ketiga uji ini memastikan bahwa model estimasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik data panel dan memberikan estimasi yang konsisten serta efisien

**Table 1. Pengujian dan Pemilihan Model Data Panel**

Uji	Hipotesis	Statistik	p-value	Keputusan	Implikasi
Chow Test (CEM vs FEM)	$H_0$ : CEM Cukup	76.3616	0.0000	Tolak $H_0$	FEM/REM > Pooled
Lagrange Multiplier (CEM vs REM)	$H_0$ : CEM Cukup	492.3311	0.0000	Tolak $H_0$	FEM/REM > Pooled
Hausman Test (FEM vs REM)	$H_0$ : REM Konsisten	3.5744	0.4667	Terima $H_0$	Pilih REM

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Pemilihan model regresi data panel diawali dengan melakukan Uji Chow untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai F-statistik sebesar 76,3816 dengan *p-value* 0,0000 ( $< 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan disimpulkan bahwa model FEM atau *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan CEM. Selanjutnya, Uji *Lagrange Multiplier* (Breusch-Pagan) dilakukan untuk membandingkan CEM dengan REM. Hasilnya menunjukkan nilai statistik sebesar 492,3322 dengan *p-value* 0,0000 ( $< 0,05$ ), yang juga menolak  $H_0$  dan mengindikasikan bahwa REM atau FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Tahap

akhir, Uji Hausman digunakan untuk membandingkan FEM dan REM. Nilai *Chi-square* sebesar 3,5744 dengan *p-value* 0,4667 ( $> 0,05$ ) menunjukkan kegagalan menolak  $H_0$ , sehingga REM dinyatakan konsisten dan efisien dibandingkan FEM. Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, model yang dipilih untuk estimasi adalah *Random Effect Model* (REM).

### Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik pada model regresi data panel dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil estimasi. Mengingat model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM) dengan metode *Generalized Least Square* (GLS), maka permasalahan heterroskedastisitas dan



autokorelasi telah terkorelasi secara internal melalui prosedur estimasi. Oleh karena itu, pengujian asumsi klasik difokuskan pada dua hal berikut:

#### **Uji Normalitas Residual**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah

**Table 2. Hasil Uji Normalitas (Jarque-Bera Test)**

Statistik Uji	Nilai	p-value	Keputusan	Kesimpulan
Jarque-Bera	1.772645	0.412169	$p > 0.05$	<b>Residual terdistribusi normal</b>

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Uji normalitas residual dilakukan menggunakan metode *Jarque-Bera*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 1.772645 dengan *p-value* sebesar 0.412169. Nilai *p-value* yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.05) mengindikasikan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

distribusi residual mendekati distribusi normal. Normalitas residual penting agar uji statistic seperti *t-test* dan *F-test* memberikan hasil yang valid, khususnya pada jumlah observasi yang relatif kecil

#### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi tinggi antar variabel independent yang dapat mengganggu kestabilan estimasi model regresi. Hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independent relative rendah hingga sedang yaitu berkisar antara -0.108506 hingga 0.537671. Nilai tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas kritis 0.80 yang biasanya digunakan sebagai indikasi adanya masalah multikolinieritas serius.

**Table 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

	IDG	KPP	PPP	PPPar
IDG	1.000000	0.305590	0.145522	0.537671
KPP	0.305590	1.000000	-0.108506	-0.063366
PPP	0.145522	-0.108506	1.000000	0.129346
PPPar	0.537671	-0.063366	0.129346	1.000000

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas yang berarti dalam model. Hal ini sejalan dengan (Gujarati, 2003), yang menekankan bahwa alat yang paling umum digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas adalah *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria  $VIF < 10$  sebagai indikasi tidak adanya multikolinieritas serius.

#### **Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)**

Pemilihan model estimasi data panel dilakukan melalui serangkaian pengujian. *Chow test* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model*

(FEM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). *Lagrange Multiplier* (LM) test mengindikasikan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai daripada CEM. Selanjutnya, Hausman test menunjukkan bahwa REM lebih konsisten dan efisien dibandingkan FEM. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka REM dipilih sebagai model terbaik untuk menganalisis hubungan variabel independent terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yang menggunakan data panel kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014-2024.

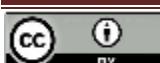
**Table 4. Hasil Estimasi Random Effect Model**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	1.855737	0.856505	2.166638	<b>0.0320</b>
IDG	0.033457	0.007852	4.260665	<b>0.0000</b>
KPP	0.106778	0.024129	4.425266	<b>0.0000</b>
PPP	0.022142	0.007839	2.824781	<b>0.0054</b>
PPPar	0.003579	0.004262	0.839808	<b>0.4025</b>

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Table 4 menyajikan hasil estimasi REM. Koefisien konstanta (C) sebesar 1.8557

menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka rata - rata lama



sekolah tetap berada pada kisaran 1,85 tahun. Variabel Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG), Kontribusi Pendapatan Perempuan (KPP), dan Proporsi Perempuan Profesional (PPP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan, keterlibatan perempuan dalam kontribusi ekonomi rumah tangga, serta peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di sektor profesional secara nyata mendorong peningkatan capaian pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah.

Sebaliknya, variabel Proporsi Perempuan di Parlemen (PPPar) memiliki koefisien positif namun tidak signifikan. Artinya, representasi politik perempuan di parlemen kabupaten/kota Sulawesi Tengah belum mampu memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan efektivitas peran legislatif perempuan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.

Dengan demikian, hasil estimasi REM menegaskan bahwa dimensi pemberdayaan ekonomi dan profesionalitas perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan capaian pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014–2024, sedangkan representasi politik perempuan belum menunjukkan pengaruh signifikan.

#### Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM) pada data panel kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014-2024, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menilai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen (rata-rata lama sekolah). Pengujian hipotesis meliputi uji t (parsial), uji F (Simultan), dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

#### Uji t Parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil estimasi ditunjukkan pada tabel 5.

**Table 5. Hasil Uji t (Parsial Effect Test)**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.	Keterangan
C	1.855737	0.856505	2.166638	0.0320	Signifikan
IDG	0.033457	0.007852	4.260665	0.0000	Signifikan
KPP	0.106778	0.024129	4.425266	0.0000	Signifikan
PPP	0.022142	0.007839	2.824781	0.0054	Signifikan
PPPar	0.003579	0.004262	0.839808	0.4025	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Berdasarkan Tabel 5, variabel IDG, KPP, dan PPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap RLS dengan probabilitas  $< 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan, kontribusi pendapatan perempuan, dan proporsi perempuan profesional berkontribusi pada peningkatan capaian pendidikan. Sebaliknya, PPar tidak signifikan ( $p > 0.05$ ), sehingga

representasi perempuan di parlemen belum menunjukkan dampak langsung terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah di wilayah penelitian.

#### Uji F (Simultan)

Uji F untuk menguji pengaruh semua variabel independent secara simultan terhadap variabel dependen

**Table 6. Hasil Uji F (Simultaneous Effect Test)**

F-statistik	Prob. (F-statistik)	Keterangan
22.57201	0.0000	Signifikan

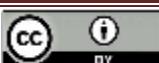
Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Nilai *F-statistic* sebesar 22.57201 dengan probabilitas 0.0000 ( $< 0.01$ ) menunjukkan bahwa model signifikan pada level 1%. Artinya, IDG, KPP, PPP, dan PPar secara bersama-sama berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah periode 2014–2024. Dengan demikian, pemberdayaan

perempuan dalam berbagai aspek secara kolektif terbukti berkontribusi pada peningkatan pendidikan.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent.



**Table 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-Squared	Adjusted R-Squared	S.E. of regression	Durbin-Watson stat
0.397241	0.379642	0.361153	0.444371

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 13 (2025)

Nilai *R-squared* sebesar 0.3972 menunjukkan bahwa sekitar 39,72% variasi rata-rata lama sekolah dapat dijelaskan oleh variabel IDG, KPP, PPP, dan PPPar. Sementara itu, sisanya sebesar 60,28% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti kualitas layanan pendidikan, belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan, maupun faktor sosial-budaya. Nilai *Adjusted R-squared* (0.3796) menegaskan bahwa daya jelaskan model berada pada kategori moderat.

## PEMBAHASAN

Temuan bahwa IDG berpengaruh positif signifikan terhadap RLS konsisten dengan teori pemberdayaan (Kabeer, 1999) yang menekankan bahwa akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial meningkatkan agency dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan terkait pendidikan. Ketika IDG meningkat, lingkungan sosial menjadi lebih suportif terhadap pendidikan perempuan melalui tiga mekanisme: peningkatan kemandirian ekonomi, perubahan norma gender, dan meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik. Temuan ini selaras dengan hasil (Clots-Figueras, 2012) dan (Samarakoon & Parinduri, 2015), namun riset ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut juga kuat pada konteks daerah dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Sulawesi Tengah. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan gender bukan hanya faktor pendukung, tetapi determinan struktural bagi capaian pendidikan perempuan di wilayah tertinggal.

Pengaruh positif KPP terhadap RLS perempuan dapat dijelaskan melalui household bargaining model, di mana anggota rumah tangga dengan kontrol ekonomi lebih besar memiliki pengaruh lebih kuat dalam keputusan domestik. Ketika perempuan memiliki kontribusi pendapatan yang signifikan, posisi tawarnya meningkat dan alokasi sumber daya lebih mungkin diarahkan pada pendidikan perempuan. Namun temuan ini juga perlu dibaca secara kontekstual: struktur sosial di beberapa kabupaten seperti Donggala dan Parigi Moutong masih memperlihatkan norma patriarkal yang kuat, sehingga efek KPP mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan pengambilan keputusan. Fakta bahwa hubungan ini tetap signifikan menunjukkan bahwa dimensi ekonomi memainkan peran kunci yang lebih stabil

dibanding dimensi sosial-kultural.

Temuan bahwa PPP berpengaruh signifikan terhadap RLS sejalan dengan Social Role Theory (Eagly, 2013), yang menyatakan bahwa representasi perempuan dalam pekerjaan profesional membentuk norma sosial baru dan menciptakan ekspektasi lebih tinggi terhadap pendidikan perempuan. Di konteks Sulawesi Tengah, profesi seperti guru, tenaga kesehatan, dan ASN perempuan menjadi simbol keberhasilan pendidikan sehingga memperkuat aspirasi keluarga untuk menyekolahkan anak perempuan lebih lama. Hal ini konsisten dengan studi di India, Pakistan, dan Indonesia yang menemukan bahwa kapasitas role model sangat berpengaruh pada aspirasi pendidikan perempuan. Menariknya, efek PPP dalam penelitian ini lebih kuat dibanding studi nasional sebelumnya, mengindikasikan bahwa wilayah dengan kesenjangan pendidikan tinggi sangat bergantung pada representasi role model perempuan untuk memecah norma gender tradisional.

Temuan bahwa PPPar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap RLS memberikan indikasi penting tentang karakter representasi politik perempuan di Sulawesi Tengah. Menurut teori representasi Pitkin (1967), representasi deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) tidak otomatis menghasilkan representasi substantif (perjuangan kepentingan pendidikan dan gender). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di DPRD belum cukup kuat untuk memengaruhi kebijakan pendidikan secara langsung, kemungkinan karena:

1. Proporsi perempuan masih rendah (di Sebagian daerah di bawah 20%)
2. Posisi strategis komisi pendidikan didominasi laki-laki
3. Agenda politik perempuan sering terhambat patronase politik local.

Selain itu, tidak signifikannya pengaruh PPPar mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan pendidikan lebih ditentukan oleh faktor struktural (pendapatan, role model profesional) dibanding representasi formal di parlemen. Temuan ini konsisten dengan studi (Brollo & Troiano, 2016) bahwa representasi politik perempuan baru berdampak jika kekuatan institusionalnya kuat.

Secara keseluruhan, sintesis hasil



menunjukkan bahwa dimensi pemberdayaan ekonomi dan sosial memiliki pengaruh lebih kuat terhadap pendidikan perempuan dibanding dimensi politik formal. Ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa transformasi pendidikan perempuan lebih banyak bergerak melalui jalur perubahan norma sosial, peningkatan kapasitas ekonomi, dan kehadiran role model, bukan melalui representasi politik yang masih terbatas secara substantif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada bukti bahwa hubungan tersebut tetap konsisten pada unit analisis kabupaten/kota, level yang jarang dieksplorasi tetapi sangat penting untuk memahami ketimpangan internal suatu provinsi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teoritis mengenai dinamika pemberdayaan perempuan dan implikasinya terhadap pendidikan dalam konteks wilayah tertinggal dan heterogen seperti Sulawesi Tengah.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah memperkuat program yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan profesional perempuan, misalnya melalui perluasan lapangan kerja formal dan akses pendidikan vokasi. Selain itu, strategi peningkatan representasi politik perempuan perlu diarahkan pada penguatan representasi substantif, bukan sekadar peningkatan jumlah kursi. Kebijakan ini hanya efektif apabila diikuti penguatan kelembagaan, alokasi anggaran pendidikan yang responsif gender, dan peningkatan kapasitas legislator perempuan untuk memperjuangkan isu pendidikan secara konsisten.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perempuan di Sulawesi Tengah terutama ditentukan oleh dimensi pemberdayaan ekonomi dan sosial, bukan semata oleh representasi politik formal. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), kontribusi pendapatan perempuan (KPP), dan proporsi perempuan profesional (PPP) terbukti memberikan pengaruh positif signifikan terhadap rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan. Ketiga variabel ini bekerja melalui mekanisme peningkatan agency, perubahan norma sosial, dan penguatan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga serta pasar kerja, sebagaimana dijelaskan oleh teori Modal Manusia, teori Pemberdayaan, dan Social Role Theory.

Sementara itu, representasi politik perempuan (PPP) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini

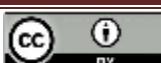
mengindikasikan bahwa keberadaan perempuan di lembaga legislatif belum berfungsi secara substantif dalam mendorong kebijakan pendidikan yang responsif gender. Temuan ini mengonfirmasi argumen Pitkin tentang keterbatasan representasi deskriptif ketika tidak didukung oleh kapasitas institusional dan struktur politik yang memungkinkan advokasi efektif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan unit analisis kabupaten/kota selama periode 2014–2024, sehingga mampu menangkap variasi spasial dan temporal yang terabaikan dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa peningkatan pendidikan perempuan dalam konteks wilayah heterogen seperti Sulawesi Tengah lebih banyak digerakkan oleh perubahan social ekonomi mikro dan kapasitas profesional perempuan, bukan oleh konfigurasi politik daerah.

## Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang penting untuk dikemukakan. *Pertama*, variabel yang digunakan terbatas pada indikator ekonomi yaitu IDG, KPP, dan PPP serta indikator politik berupa PPP. Faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi rata-rata lama sekolah perempuan, seperti kualitas layanan pendidikan, belanja publik di sektor pendidikan, maupun aspek sosial-budaya, belum diakomodasi dalam model analisis. *Kedua*, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder dari BPS dan KPU sehingga tidak mampu menangkap dimensi kualitatif seperti persepsi masyarakat, hambatan budaya, atau pengalaman perempuan secara langsung dalam mengakses pendidikan. *Ketiga*, penelitian difokuskan hanya pada konteks Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat serta-merta digeneralisasi ke provinsi lain dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan, misalnya alokasi belanja pendidikan daerah, kualitas infrastruktur sekolah, angka perkawinan dini, maupun faktor sosial-budaya yang lebih luas, agar menghasilkan pemodelan yang lebih komprehensif. Pendekatan *mixed methods*, dengan menggabungkan analisis kuantitatif berbasis data panel dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam atau diskusi kelompok terarah, akan memperkaya pemahaman tentang persepsi dan pengalaman perempuan dalam pendidikan. Studi komparatif antarprovinsi atau antarwilayah di Indonesia juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan



konteks ekonomi, sosial, dan politik memengaruhi capaian pendidikan perempuan. Selain itu, penelitian longitudinal dengan rentang waktu yang lebih panjang, misalnya hingga periode pasca-2030, akan membantu menyingkap dinamika jangka panjang pemberdayaan perempuan terhadap pembangunan pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs 4 dan 5. Terakhir, penelitian mendatang perlu menyoroti dimensi representasi substantif dengan mengkaji sejauh mana legislator perempuan benar-benar berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan, bukan sekadar hadir dalam jumlah kursi, sehingga efektivitas representasi politik dapat dinilai secara lebih mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Becker, G. (1964). *Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press, Chicago. - References - Scientific Research Publishing. Journals A-Z.  
[https://www.scirp.org/reference/reference\\_spapers?referenceid=1634120](https://www.scirp.org/reference/reference_spapers?referenceid=1634120)
- BPS. (2024). Statistik pendidikan 2024 (Vol. 13). In Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>
- Brollo, F., & Troiano, U. (2016). What happens when a woman wins an election? Evidence from close races in Brazil. *Journal of Development Economics*, 122, 28–45.  
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.04.003>
- Clots-Figueras, I. (2012). Are Female Leaders Good for Education? Evidence from India. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4(1), 212–244.  
<https://doi.org/10.1257/APP.4.1.212>
- Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079.  
<https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>
- Eagly, A. H. (2013). *Sex Differences in Social Behavior: A Social-role interpretation*. Psychology Press.
- Global Education Monitoring Report. (2025). Women lead for learning.  
<https://doi.org/10.54676/EOQI483>
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. In Lucille Sutton (Ed.), McGraw-Hill (Internatio). Gary Burke.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. <https://philpapers.org/rec/FENTCO-12>
- Samarakoon, S., & Parinduri, R. A. (2015). Does Education Empower Women? Evidence from Indonesia. *World Development*, 66, 428–442.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.002>
- Sen, A. (1999). *Develeopment as freedom*. Anchor Books, New York, 384
- Tarigan, R. C., & Tjandrakirana, R. (2025). The Effect of Profitability, Managerial Ownership, Gender Diversity, and Audit Quality on The Integrity of Financial Statements. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 68-78

